

**KETERLIBATAN WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE (WWF)  
DALAM UPAYA KONSERVASI HARIMAU SUMATERA  
DI SUAKA MARGASATWA BUKIT RIMBANG  
BUKIT BALING PROVINSI RIAU  
TAHUN 2010-2014**

**Oleh :**  
**Nur Isadah Sinamo**  
**email :nurisadah.sinamo@gmail.com**

**Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP, M.A**  
**Bibliografi : 12 Buku, 5 Jurnal, 4 Laporan, 19 Website**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research will explain about involvement from an international organization named World Wildlife Fund For Nature (WWF) in Sumatera tiger conservation at Bukit Rimbang Bukit Baling, Kuantan Sangingi Riau province. Less of concervation understanding, less of economic, boundary problem, Illegal logging, woods areal conversion into plantations and farms, mine workings, illegal persecution of Sumatera Tiger and less of law have been threatening the Sumatera Tiger population and declining the number of rare every year. As an international organization of conservation based in Swiss who works in environmental issues, biological diversity, and climate change, WWF works together with Riau government to carry out conservation programs such as TPU (Tiger Protection Unit), Tiger Research, Empowerment Comunity, Multilevel Campaign and Regulation Increase at Bukit Rimbang Bukit Baling Concervation.*

*Sources were obtained through literature review from journals, books, mini thesis, reports, and internet to explain WWF's planned programs. Writer also did some interviews and observations by observing and taking notes of the indications systematically and directly. The theories used in this research are pluralism and green politic theory.*

*This research indicates the reasons involvement of WWF on Sumatera tiger concervation are needed of government's partner on concervation field and urgency of Sumatera tiger on Bukit Rimbang Bukit Baling. WWF got involvement cause of has good funding, has infrastructures for research, and good understanding on wild animals.*

**Keywords:** *World Wildlife Fund for Nature, Sumatera tiger concervation, involvement, Conservation Program*

## Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) dalam upaya konservasi harimau Sumatera di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, Kuantan Sangingi Provinsi Riau. Isu lingkungan hidup menjadi salah satu fokus penting dalam kajian Hubungan Internasional saat ini. Masalah lingkungan hidup menjadi permasalahan global karena berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam serta emisi gas yang menyebabkan perubahan iklim dunia. Masalah lingkungan juga bersifat transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah, meskipun permasalahannya hanya tingkat lokal, namun dialami lintas negara serta selalu berkaitan dengan ekonomi-sosial maupun politik menjadi pendorong bahwa isu lingkungan hidup yang semula dianggap biasa menjadi kajian yang mendorong banyak pihak untuk berpartisipasi kedalamnya.

Perlindungan satwa liar untuk menjaga keseimbangan ekosistem menjadi satu dari beberapa topik perbincangan dunia saat ini. Salah satu satwa liar yang difokuskan dunia internasional saat ini harimau, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sebaran harimau, yang dikenal dengan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

Indonesia pernah memiliki tiga dari delapan subspecies harimau yang ada di dunia, namun dua di antaranya, yaitu harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) dan harimau Bali (*Panthera tigris balica*) telah dinyatakan punah, masing-

masing pada tahun 1940-an dan 1980-an.<sup>1</sup> Saat ini hanya sub spesies harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang tersisa. Sejak tahun 1996 *The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources / The World Conservation Union* (IUCN) mengkategorikan harimau Sumatera sebagai satwa yang habitatnya terancam punah (*critically endangered*) dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) juga mengkategorikan satwa liar tersebut masuk kedalam status *Appendix I* yang artinya dilarang keras melakukan perburuan dan perdagangan satwa ini.

Bagian tengah Sumatera adalah kantong penting bagi harimau. Satwa liar biasanya senang tinggal di dataran rendah bagian tengah pulau Sumatera yang merupakan koridor atau jalur perlintasan satwa. Lanskap ini menciptakan banyak relung yang sering disinggahi berbagai satwa liar, sehingga kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Salah satu kawasan yang tersebut adalah kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan luas 136.000 ha. Ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk. I Riau. Nomor Kpts.149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982. Kawasan ini berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Sangingi dan Kampar, Provinsi Riau. Penetapan kawasan

---

<sup>1</sup> Dokumen Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) 2007– 2017. [http://filesdown.esecure.co.uk/wildlifepark/Leaflet\\_konservasi\\_harimau\\_sumatera.pdf\\_23102008-0902-34.pdf](http://filesdown.esecure.co.uk/wildlifepark/Leaflet_konservasi_harimau_sumatera.pdf_23102008-0902-34.pdf) diakses tanggal 28/10/2015 Pukul 10.00

hutan ini sebagai suaka margasatwa didasarkan atas pertimbangan bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu tipe hutan dataran rendah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan berbagai habitat satwa yang langka dan terancam punah.

Estimasi jumlah populasi harimau Sumatera di Riau khususnya, di SM Rimbang Baling diperkirakan mengalami penurunan setiap tahunnya. Ini dipicu oleh banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kawasan SM yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ditetapkan sebuah kawasan konservasi, harusnya tidak ada manusia ataupun aktifitas kehidupan masyarakat didalam kawasan suaka margasatwa, kecuali mereka merupakan penduduk asli atau dengan kata lain penduduk lokal maka mereka berhak menetap disana dengan catatan tidak memperluas wilayah batas yang telah diberikan kepada penduduk lokal yang mendiami wilayah SM dan juga diharapkan bisa hidup menyatu dengan alam. Di SM Rimbang Baling sendiri terdapat ratusan penduduk di dalam kawasan konservasi yang kian hari terus berkembang dan faktanya, sebelum ditetapkan menjadi Suaka Margasatwa Rimbang Baling mereka sudah ada disana dan menetap disana lebih dulu. Seiring berjalan waktu, masyarakat semakin berkembang dan bertambah sehingga membutuhkan wilayah yang lebih luas lagi dan menambah aktifitas di sekitar kawasan SM. Permasalahan juga berlanjut manakala masyarakat merasa ditipu atas pertanyaan letak batas tanah ulayat yang mereka

punya. Penduduk juga melakukan perambahan hutan kawasan konservasi dan menanam tanaman karet dan juga sawit disana. Sementara jelas dalam sebuah kawasan konservasi dilarang adanya perkebunan kecuali tanaman endemik atau tanaman khas yang ada di kawasan SM Rimbang Baling. Aktifitas penambangan liar juga terjadi di sekitar kawasan SMRB. Aksi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa tapi juga oleh beberapa perusahaan baik legal maupun illegal, tanpa memikirkan dampak negatif dari penambangan yang mereka lakukan. Aktifitas penambangan ini beragam, ada penambangan emas dan juga penambangan batu bara. Banyaknya aktifitas penduduk disekitar kawasan sangat mengancam pada keberadaan populasi satwa liar yang ada di SM Rimbang Baling tersebut, belum lagi bekas penambangan yang ditinggal begitu saja dan member efek pencemaran sungai menyebabkan kerugian pada masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk seluruh aktifitas mereka. Selain itu alih fungsi lahan disekitar kawasan SM oleh perusahaan-perusahaan juga menjadi celah ancaman besar terhadap kawasan konservasi karena semakin terbukanya akses jalan bagi para pemburu harimau Sumatera.

Dalam mengatasi masalah ini, sebenarnya pemerintah Riau yang bidang ini diwakilkan oleh Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA Riau) sudah melakukan berbagai upaya dan pendekatan dalam menangani segala permasalahan yang ada di SM Rimbang Baling. Namun beberapa keterbatasan seperti luasnya lokasi 136.000 ha dengan hanya

mengandalkan 3 personil polisi hutan untuk melindungi luas kawasan SMRB, tentu pihak BBKSDA butuh penambahan mitra kerja lapangan.<sup>2</sup> Keterbatasan lainnya adalah BBKSDA Riau tidak semua ahli dalam bidang lapangan. Jadi untuk aspek pengelolaan lapangan dan konservasi, sangat sulit jika tidak berkompeten di dalamnya. Tingginya ancaman lapangan bisa membahayakan setiap petugas yang turun ke kawasan yang tidak memiliki *skill*. BBKSDA mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Kemudian minimnya riset ilmiah yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait riset ilmiah, BBKSDA mengakui bahwa keterbatasan sarana dan prasarana dan minimnya fasilitas BBKSDA yang mendukung riset ilmiah, khususnya bidang monitoring harimau, yaitu camera trap menyebabkan BBKSDA sulit untuk melakukan riset berkala. Alasan lain yang menjadi kendala adalah minimnya anggaran dan juga banyak kawasan SM lain juga yang dikelola oleh pemerintah, sehingga pendanaan pun terbagi dan otomatis mempengaruhi aktifitas dalam mendukung pengelolaan SMRB tersebut. Terakhir adalah masalah aspek sosial yang terjadi di desa yang ada di kawasan SM Rimbang Baling. Terkait ketidakpercayaan dan kekecewaan serta bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap pihak pemerintah yang selalu turun ke lapangan menjadikan bahan pertimbangan besar pihak pemerintah akan kebutuhan mutlak

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jhonny Lagawurin, selaku Kepala Bidang Teknis Wilayah 1, BKSDA Rengat, lokasi Koto Baru, Kuantan Sangingi hari Jumat, 11 Desember 2015, Pukul 09.00

pihak fasilitator yang bisa membantu pemerintah mengubah persepsi salah masyarakat yang menjadikan sebuah tembok pembatas antara pemerintah dan masyarakat lokal. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang memang disadari oleh BBKSDA Riau akan kebutuhan yang sangat mengharuskan mereka memiliki mitra kerja kuat yang bisa membantu mereka dalam segala aspek namun tetap memiliki visi yang sama sehingga kedepannya tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Menimbang kembali tingginya ancaman yang terjadi di kawasan SM Rimbang Baling menyebabkan BBKSDA memang tidak bisa melakukan pengelolaan sendiri, namun harus melibatkan multi pihak.

## Kerangka Teori

Adapun yang menjadi kerangka dasar teoritis dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan perspektif pluralis, tingkat analisa organisasi internasional, teori politik hijau.

Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya sebatas pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal. Asumsi paradigma ini adalah aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintahan, MNCs, kelompok ataupun individu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>M.Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan*

Organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda.<sup>4</sup> Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Internasional. Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.<sup>5</sup>

Teori politik hijau merupakan isu baru dalam kamus politik kontemporer. Menurut Tim Hayward, perkembangan teori Politik Hijau (*Green political theory*) diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam, sehingga yang memiliki implikasi bagi perilaku politiknya. Dengan argumen ini, teori politik juga harus selaras dengan teori-teori

lingkungan. Artinya, manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalisme) atau sebagai makhluk sosial (seperti pandangan sosialisisme) akan tetapi sebagai *natural beings*, dan lebih jauh sebagai *political animals*.<sup>6</sup>

Kritik teori politik hijau terhadap tradisional menghasilkan asumsi dasar dan karakteristik dari pandangan ini sendiri. Terdapat dua konsep dasar dalam teori politik hijau yakni ekosentrisme dan batas-batas pertumbuhan (*limits to growth*). Asumsi pertama adalah ekosentrisme. Ekosentrisme lahir karena penentangan akan Antroposentrisme yang menganggap bahwa manusia sebagai pusat segalanya. Teori politik hijau mengkritik adanya etika Antroposentris yang menempatkan kepentingan materi manusia lebih dahulu daripada kelangsungan ekosistem atau lingkungan.

Eckersley menyatakan bahwa terdapat dua karakteristik dasar dalam Ekosentrisme yakni empiris dan etis. Empiris yakni sebuah klaim yang melibatkan pandangan dunia bahwa semua makhluk hidup pada dasarnya terikat hubungan dengan lingkungan. Dasar etis yakni adanya emansipasi besar dalam ekosentrisme bahwa terdapat hubungan erat antara lingkungan, manusia dan spesies lain selain manusia. Teori politik hijau menawarkan pandangan dunia yang 'holistik' dengan fokus terhadap adanya koneksi antara kehidupan manusia dan ekosistem global.

---

*Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol.3 No.2, hlm 15

<sup>4</sup> Rudy, T. May. Drs., SH., MA., MIR. 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung. PT Eresco

<sup>5</sup> Perwita A.A dan Y. M. Yani. "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005 hal 92

---

<sup>6</sup>Tim Harward, *Green Political Theory*, Unuversity of Edinburd, tersedia di <http://www.psa.ac.uk/cps/1996/hayw.pdf> [Diakses pada tanggal 6 November 2015]



Asumsi selanjutnya adalah batas-batas pertumbuhan (limits to growth), politik hijau berpandangan bahwa terdapat batas-batas tertentu bagi manusia untuk mengadakan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan yang dilakukan seperti perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan adanya krisis yang saling berhubungan. Menurut Dobson terdapat tiga argumen penting yakni bahwa teknologi tidak dapat mencegahnya pada titik tertentu walaupun dapat menunda krisis tersebut, peningkatan pertumbuhan dapat mengakibatkan bencana dan adanya hubungan antara berbagai permasalahan.

Selain asumsi diatas, terdapat pula kritik politik hijau terhadap negara. Politik hijau menganggap bahwa negara merupakan bagian dari dinamika masyarakat modern yang menyebabkan krisis lingkungan saat ini. Politik hijau mengusulkan untuk meninggalkan sistem praktek kedaulatan tradisional menuju suatu otoritas yang beragam. Jika demikian, aktor dalam politik hijau bukanlah negara. Aktor yang dalam pandangan ini adalah organisasi-organisasi non-negara seperti gerakan lingkungan Greenpeace, WWF, dll. Organisasi tersebut memakai pandangan politik hijau untuk menghadapi krisis lingkungan yang terjadi.

Tidak terbatas pada isu lingkungan, politik hijau juga memiliki tujuan atas ketidakadilan yang terjadi. Teori politik hijau juga memiliki fokus mengenai menciptakan sebuah keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah yakni melalui adanya perhatian krisis lingkungan yang tidak merata di dunia. Dengan

mengekspos wilayah-wilayah yang tidak memiliki kebutuhan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya diharapkan menyadarkan manusia bahwa masih terdapat ketimpangan sumber daya bagi masyarakat lainnya.

## **Pembahasan**

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh BBKSDA Riau mengharuskan mereka memiliki mitra kerja kuat yang bisa membantu mereka dalam segala aspek namun tetap memiliki visi yang sama sehingga kedepannya tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Menimbang kembali tingginya ancaman yang terjadi di kawasan SM Rimbang Baling menyebabkan BBKSDA memang tidak bisa melakukan pengelolaan sendiri, namun harus melibatkan multi pihak.

Berdasarkan wawancara, pihak BBKSDA menyatakan bahwa WWF merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang sangat mendukung program pemerintah dalam bidang pelestarian ekosistem dan perlindungan satwa liar. BBKSDA kemudian melakukan kerjasama dengan WWF Riau dalam beberapa bidang dan salah satunya adalah aspek perlindungan habitat harimau di suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Dan bukti kerjasama yang dilakukan juga tertuang pada MoU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pengelolaan konservasi harimau dan penyelesaian masalah yang terjadi di kawasan, pemerintah sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Namun sepenuhnya, melihat ancaman yang sangat tinggi dalam kawasan suaka margasatwa,

peneliti juga mengakui bahwa pemerintah sangat membutuhkan partner khusus yang memang bisa diandalkan untuk setiap aspek pengelolaan. Kriteria mitra kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan adalah WWF Riau. Mengingat visi dan misi dari organisasi internasional ini sehingga bergerak sampai ke wilayah terkecil dari sebuah negara menunjukkan bahwa memang WWF siap untuk segala kondisi yang terjadi dan komitmen mewujudkan visi misinya. Sehingga tidak heran, selain kebutuhan pemerintah akan *partner* kerja yang berkompeten, WWF juga ingin mewujudkan visi misinya untuk menyelaraskan keberlangsungan ekosistem dan pemberdayaan kehidupan yang lestari dalam arti masyarakat berdampingan hidup bersahabat dengan alam.

Kemudian, yang menjadi alasan mengapa WWF terlibat adalah bahwa pihak BBKSDA melihat WWF merupakan organisasi internasional yang sangat fokus pada perlindungan Flora dan Fauna, fokus terhadap perlindungan habitatnya. Didukung oleh sumber dana WWF yang memadai sementara pemerintah sendiri sangat minim dengan anggaran. BBKSDA butuh mitra yang Funding-nya dari luar negeri dengan visi yang fokus terhadap Flora Fauna.

Kemudian seperti pernyataan Rinaldo, WWF banyak orang pintarnya, dalam arti disana terdapat tenaga tenaga ahli spesies yang cukup profesional, jadi sangat membantu terutama dalam aspek monitoring dan riset ilmiah. WWF juga cukup membantu patroli pengawasan kawasan melalui pembentukan Tim TPU yang sangat

membantu dalam memonitoring kejahatan satwa harimau khususnya. Dan menjadi faktor pendukung WWF sebagai mitra yang tepat adalah peralatan dan sarana prasarana WWF yang memadai terutama saat turun ke lapangan. Salah satunya yaitu memonitoring wilayah SMRB dengan camera trap, dan WWF punya banyak camera tersebut.

Osmantri selaku kepala bidang investigasi kejahatan satwa liar WWF Riau menanggapi ketika peneliti menanyakan mengapa WWF terlibat dalam wilayah konservasi adalah bahwa WWF memiliki visi misi yang harus diwujudkan. Artinya kami organisasi Internasional sangat memperhatikan lingkungan dari segala aspek. Dan Rimbang Baling merupakan kawasan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati didukung lagi oleh keberadaan habitat harimau disana. Harimau Sumatera sudah masuk dalam status critically endangered dan menurut data TRAFFIC sudah masuk pada status *Appendix I* jadi memang tidak ada kata tidak untuk tidak terlibat dalam aksi penyelamatan habitat harimau yang sampai semua negara banyak melakukan konvensi atau forum internasional terhadap aksi penyelamatan harimau termasuk harimau Sumatera.

Mendukung pernyataan dari Osmantri, Febri juga memberi tanggapan mengapa WWF Riau bisa terlibat dalam pengelolaan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Menurut beliau, tanpa pemerintah mengajak pun, WWF sudah menawarkan diri untuk membantu dalam perlindungan harimau Sumatera yang kritis populasinya. Tidak terlepas dari visi

dan misi WWF, kritisnya kondisi kawasan konservasi juga menjadi panggilan darurat terhadap WWF untuk siaga menyelamatkan keanekaragaman hayati yang ada disana. Sebagai organisasi yang memang bergerak dalam bidang lapangan, tentunya penguatan *skill* dan *capability* lapangan menjadi syarat mutlak WWF sebelum memasuki banyak kawasan termasuk Rimbang Baling sendiri. Jadi secara teknis WWF siap membantu pemerintah dan menjadi mitra kerja yang menyatukan visi bersama.

Disamping itu, menurut Febry, WWF sendiri juga organisasi yang struktur keanggotaannya sistematis, didukung oleh setiap unit yang menjalankan fungsi dan peran berbeda, jadi lebih memudahkan pihak pemerintah (BBKSDA) dalam mendapatkan ide-ide program kedepan yang menunjang peningkatan pengelolaan kawasan suaka margasatwa dan juga pemberdayaan masyarakat sebagai pihak yang akan selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan konservasi.

Pihak BBKSDA Riau sendiri juga mengakui bahwa WWF selalu memberikan ide program yang menunjang kedua belah pihak untuk terus melakukan pengelolaan lebih baik, termasuk penguatan silaturahmi masyarakat, pemerintah dan pihak WWF.

Adapun upaya yang dilakukan WWF terhadap perlindungan populasi harimau Sumatera di SM Rimbang Baling adalah dengan pertama, Membentuk *Tim Tiger Protection Unit* (TPU) untuk menyikapi banyaknya informasi yang didapatkan akan kematian harimau Sumatera yang terus meningkat.

Sejak dioperasikan ditahun 2004 hingga sekarang, tim ini telah berhasil menyita sedikitnya 800 jerat baik yang digunakan untuk membunuh harimau maupun jebakan mangsanya. Pembentukan TPU ini juga diharapkan bisa mengidentifikasi semua ancaman yang terjadi di wilayah hunian atau habitat harimau. Kedua, melakukan riset dan penelitian ilmiah dengan *camera trap*. Melalui *camera trap* ini, WWF juga memperoleh data mengenai mangsa dari harimau Sumatera, serta meneliti berbagai kehidupan spesies dan satwa liar lainnya di kawasan SM Rimbang Baling. *Camera trap* ini bekerja dengan sensor infra merah yang otomatis teraktifasi saat sensor tersebut mengidentifikasi panas tubuh yang melintasinya. Ketiga, Mengembangkan *Empowerment Community*. WWF menilai bahwa berbicara upaya perlindungan satwa liar dan melakukan konservasi harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat karena dalam pandangan WWF masyarakat menjadi ancaman utama yang menyebabkan permasalahan terjadi di kawasan konservasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak WWF terhadap pemberdayaan masyarakat di SM Rimbang Baling adalah dengan membantu program lubuk larangan di Desa Sungai Tapi dan menjalankan *Project Fresh-Water Labolatorium*. Keempat, melakukan kampanye multilevel. Beberapa kampanye yang masih terus dilangsungkan sampai sekarang adalah Menjalankan kampanye publik *The Year of Tiger 2010*, peringatan *Global Tiger Day*, dan nonton bareng film pendek "*Sungai Untuk Semua*" yang dibuat oleh WWF. Terakhir adalah meningkatkan



aspek regulasi. Regulasi yang dimaksud disini merupakan sebuah pengaturan yang mengikat suatu kelompok, lembaga, atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. WWF menyadari bahwa setiap aktifitas dan pergerakan yang dilakukan dalam konservasi haruslah berdasarkan regulasi. Salah satu regulasi yang menjadi acuan WWF dalam mendukung programnya adalah dokumen Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera 2007-2017 yang disusun atas kerjasama multipihak dan dirilis oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dokumen Strategi dan Rencana Aksi (action plan) Konservasi Harimau Sumatera 2007-2017 mengisyaratkan harapan bahwa pada tahun 2017 populasi harimau Sumatera tidak terancam lagi

Selain itu, terkhusus pada kawasan Rimbang Baling, semua aktifitas WWF juga mengacu pada Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati bersama oleh pihak WWF dan BBKSDA Riau.

## Kesimpulan

World Wildlife Fund For Nature (WWF) adalah yayasan yang independen, tidak memihak dan obyektif dalam berurusan dengan pemerintah, partai politik, organisasi dan individu lain. Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu untuk melestarikan lingkungan alam dan proses ekologi di seluruh dunia. Hal ini diambil untuk memasukkan fauna dan flora, landscape, air, tanah, udara dan sumber daya alam lainnya, dengan penekanan khusus pada

pemeliharaan proses ekologi esensial dan sistem pendukung kehidupan, dan pada pelestarian genetik, spesies dan ekosistem, dan untuk memastikan bahwa pemanfaatan spesies liar dan ekosistem alami yang berkelanjutan. Salah satu spesies yang terancam punah dan saat ini gencar dilindungi oleh WWF adalah Harimau Sumatera.

Harimau Sumatra atau dalam bahasa latin disebut *Panthera tigris sumatrae* hanya ditemukan di Pulau Sumatra di Indonesia, merupakan satu dari enam sub-spesies harimau (*Panthera tigris*) yang masih bertahan hidup hingga saat ini setelah dua saudaranya Harimau Bali (*Panthera tigris balica*) dan Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) dinyatakan punah.

Harimau Sumatera merupakan satwa langka yang masuk pada *Apendix I* dalam kategori Cites yang merupakan kategori spesies kritis terancam punah (*critically endangered species*). Hewan ini diperkirakan tinggal 400-500 ekor di seluruh Sumatera. Di propinsi Riau satwa ini di prediksi tersebar ke beberapa kawasan lindung salah satunya adalah Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

SM Rimbang Baling seluas 136.000 ha, ditunjuk sebagai Suaka margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk. I Riau. Nomor Kpts.149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982. Kawasan ini berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar, Provinsi Riau. Penetapan kawasan hutan ini sebagai suaka margasatwa didasarkan atas pertimbangan bahwa kawasan ini merupakan kawasan

yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu tipe hutan dataran rendah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan berbagai habitat satwa yang langka dan terancam punah.

Kondisi SM Rimbang Baling sangat memprihatinkan saat ini, dan sangat disayangkan jika pada akhirnya, pemasalahan yang terjadi di kawasan konservasi menyebabkan harus hilangnya hutan terkhusus pada satwa harimau Sumatera yang menjadikan kawasan hutan lindung Rimbang Baling sebagai rumah, kemudian mengancam juga pada keanekaragaman hayati yang tinggi di kawasan konservasi harimau.

Permasalahan dimulai dari penduduk lokal yang dibiarkan menetap di daerah inti kawasan SM namun seiring perkembangan waktu, mereka mulai merambah hutan dan memburu satwa liar di dalam hutan kawasan SM. Faktor lainnya adalah adanya olah fungsi lahan oleh perusahaan-perusahaan disekitar batas kawasan SM sehingga membuka akses mudah bagi pemburu satwa liar untuk masuk kawasan SM. Aksi penambangan liar disekitar kawasan SM juga membuat masalah semakin rumit di SM Rimbang Baling. Faktor lemah dan ringannya hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan satwa liar dan penebang hutan illegal menjadi faktor mengapa permasalahan ini sulit diselesaikan.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA Riau) memang telah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam mengelola kawasan SM dan menindaklanjuti permasalahan yang ada. Namun dipengaruhi oleh faktor pemahaman, baik dari masyarakat,

baik dari organisasi pemerintah yang terkecil (desa)/RT yang belum memahami makna konservasi, dipengaruhi juga oleh faktor keterbatasan personil polisi hutan, sarana dan prasarana berupa kendaraan, peralatan dan pos peristirahatan juga kurang karena akses kedalam yang jauh serta terakhir anggaran pendanaan yang minim dari pemerintah, menjadikan BBKSDA Riau tidak mampu untuk mengelola kawasan SM sendiri dan membutuhkan mitra khusus dalam menunjang berjalannya pengelolaan SM Rimbang Baling tersebut. WWF menjadi pilihan mitra kerja BBKSDA Riau yang paling aktif dalam membantu pengelolaan SM sekarang.

Alasan mengapa BBKSDA Riau memilih WWF adalah karena WWF merupakan organisasi internasional yang sangat fokus pada perlindungan Flora dan Fauna, fokus terhadap perlindungan habitatnya, sumber dana WWF yang memadai sementara pemerintah sendiri sangat minim dengan anggaran. BBKSDA butuh mitra yang Funding-nya dari luar negeri dengan visi yang fokus terhadap Flora Fauna. WWF banyak orang pintarnya, dalam arti disana terdapat tenaga tenaga ahli spesies yang cukup profesional, WWF juga cukup membantu patroli pengawasan kawasan serta membantu sekali dalam riset ilmiah dalam mendata satwa dengan camera trap yang mereka miliki.

WWF kemudian melakukan kerjasama dengan BBKSDA Riau, menyusun dokumen rencana kerjasama, Membantu dalam pendataan satwa, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Penanganan illegal logging (Resort

base management) dan terakhir adalah perencanaan untuk melakukan *project Mikrohidro* atau *Fresh-water Project*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bennet, A. Le Roy. *International Organization*. London : George Allen and Unwin Publisher Company 1995
- Burchill Scott dan Andrew Linklater. *Theories of International Relation*. New York. ST Martin's Press, INC., 2009
- Cheever Daniel S. & H. Field Haviland Jr, *Organizing for Peace: International Organization in. World Affairs*, Houghton Mifflin Co, Boston, New York, 1967
- Creswell John W. 1998. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA
- Editor: James N. Rosenau, Ernst-Otto Ezempiel, *Governance Without Government: Order and Change in World Politics*. New York: Cambridge University Press, 1992
- Goodin R. E. . *Green Political Theory*, Cambridge, 1992
- Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. 1990 (LP3ES, Jakarta)
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: Rosdakarya.
- Paul R Viottidan Mark V. Kauppi. *International Relation Theory : Realism, Pluralism, Globalism*. Mac Millan Publishing Company. New York. 1990

Perwita A.A dan Y. M. Yani. "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005

Sumaryo Suryokusumo. *Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997.

Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

### Jurnal

- Annual Review WWF 2010, [http://assets.panda.org/downloads/int\\_ar\\_2010.pdf](http://assets.panda.org/downloads/int_ar_2010.pdf) diakses tanggal 22/11/2015 Pukul 17.00
- BKSDA Propinsi Riau. 2010. Laporan Kondisi Taman Nasional dan Suaka Margasatwa Dalam Wilayah Administrasi Propinsi Riau. Pekanbaru
- Data hasil Tim Riset WWF Riau Departemen Kehutanan. 2007. Dokumen Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) 2007 - 2017
- Fakultas Kehutanan IPB. 2000. Laporan Akhir Rencana Pengelolaan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Kerjasama antara Unit Konservasi Sumberdaya Alam Riau dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Pekanbaru.
- <http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0030859>
- Kerjasama Yayasan Alam Sumatera dengan Yayasan WWF Indonesia 2005, Laporan Akhir Investigasi Perburuan Dan Perdagangan Harimau Dan

Bagian Tubuhnya Di Provinsi Riau.

Portal Perizinan Kehutanan Provinsi Riau

Sunarto S, Kelly MJ, Parakkasi K, Klenzendorf S, Septayuda E, et al. (2012) *Tigers Need Cover: Multi-Scale Occupancy Study of the Big Cat in Sumatran Forest and Plantation Landscapes*. PLoS ONE 7(1): e30859. doi:10.1371/journal.pone.0030859

Yayasan WWF Indonesia Program Riau. Tiger Protection Unit. *SMBRBB, Kekayaan Alam yang Terancam*. <http://www.stripetosecure.or.id/smbrbb-kekayaan-alam-yang-terancam.php>

#### Artikel dan Website

Ayu Rahmadhani. *Article Politik Hijau dalam Hubungan Internasional*. [http://ayurahmadhanifisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail80092Teori%20Hubungan%20InternasionalPolitik%20Hijau%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html](http://ayurahmadhanifisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail80092Teori%20Hubungan%20InternasionalPolitik%20Hijau%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html)

Belantara Indonesia, Penggiat Alam Bebas Dan Penempuh Rimba, Artikel: 2015, *Harimau Sumatera Diprediksi Punah*. diakses hari Selasa, 1 Desember 2015, Pukul 17.00

Surga Tersembunyi di Camp TPU Sungai Tapi, Stripe to Secure. <http://www.stripetosecure.or.id/surga-tersembunyi-di-camptpusungaitapi.php>

Website resmi WWF Global, [http://wwf.panda.org/who\\_we\\_are/jobs/](http://wwf.panda.org/who_we_are/jobs/) diakses Sabtu, 21/11/2015 Pukul 13.00

Website Resmi Yayasan WWF Indonesia

[http://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/faq/](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/faq/) diakses Sabtu, 21/11/2015 Pukul 14.00

[http://awsassets.wwf.or.id/downloads/tiger\\_facts\\_and\\_trivia\\_dec\\_09.pdf](http://awsassets.wwf.or.id/downloads/tiger_facts_and_trivia_dec_09.pdf) diakses Selasa, tanggal 01 Desember 2015, Pukul 23.00

[http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwfid\\_newstructure\\_2014\\_template.png](http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwfid_newstructure_2014_template.png), diakses tanggal 11 Desember 2015

[http://awsassets.wwf.or.id/img/original/tiger\\_roar.jpg](http://awsassets.wwf.or.id/img/original/tiger_roar.jpg) diakses Selasa, tanggal 1 Desember 2015 Pukul 22.00

[http://filesdown.esecure.co.uk/wildlife/park/Leaflet\\_konservasi\\_harimau\\_sumatera.pdf\\_23102008-0902-34.pdf](http://filesdown.esecure.co.uk/wildlife/park/Leaflet_konservasi_harimau_sumatera.pdf_23102008-0902-34.pdf) diakses tanggal 28/10/2015 Pukul 10.00

<http://riauterkini.com/lingkungan.php?arr=101403&judul=Pemerintah%20Sosialisasikan%20Keberadaan%20Hutan%20Lindung%20Bukit%20Rimbang%20Baling> <http://www.belantaraindonesia.org/2010/02/2015-harimau-sumatera-diprediksi-punah.html> diakses tanggal 24/10/2015

<http://www.greenpeace.org>  
<http://www.logodesignlove.com/world-wildlife-fund> diakses tanggal 22/11/2015 Pukul 17.00

<http://www.mongabay.co.id/2014/10/02/mendesak-implementasi-rencana-konservasi-harimau-sumatera/> diakses tanggal 28/10/2015

<http://www.stripetosecure.or.id/smbrbb-kekayaan-alam-yangterancam.php> diakses tanggal 05 Desember 2015. Pukul 03.00

<http://www.wwf.or.id>  
<http://www.wwf.or.id/?42923/Lokakarya-Pengenalan-Program-Terpadu-Konservasi-Harimau->

*dan-Habitatnya-di-Rimbang-  
Baling*  
*[http://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/whoare/](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoare/)*

*[http://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/whoare/organisasi/](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoare/organisasi/)*